



Arogasi Kekuasaan dalam Qashashul Qur'an: Analisis Psikologis Tokoh Fir'aun sebagai Ibrah bagi Kepemimpinan Modern

Nurfakhruddin Al-Mubarak¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nurfakhruddinalmubaraq@gmail.com

Nasrullah Bin Sapa²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id

Muhammad Amin Sahib³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
amin.sahib@uin-alauddin.ac.id

Korespondensi: email: nurfakhruddinalmubaraq@gmail.com

Abstrak

History Artikel:
Diterima 2 November 2025
Direvisi 13 November 2025
Diterima 14 November 2025
Tersedia online 1 Desember 2025

Power, in the Qur'anic perspective, is a divine trust (*amanah*) that demands both moral and spiritual accountability. Yet history reveals that power often transforms into a source of arrogance and oppression when detached from the principle of *tawhid*. This article explores the arrogance of power in the *Qashash al-Qur'an* through a psychological analysis of Pharaoh as the archetype of absolute authoritarianism. The study aims to identify the psychological dimensions of Pharaoh's arrogance and to extract moral lessons (*ibrah*) relevant to contemporary leadership. Using the thematic interpretation (*tafsir maudhu'i*) method with an interdisciplinary approach, it combines classical exegesis (al-Qurthubi, al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, and al-Mawardi) with social-psychological theories of authoritarianism and power narcissism. The findings indicate that Pharaoh's arrogance stems from spiritual blindness, delusions of self-deification, and fear of losing legitimacy. Unrestrained power leads to dehumanization and systemic injustice, while Qur'anic leadership emphasizes trust, justice, and self-purification as antidotes to tyranny. This study contributes to the interdisciplinary dialogue between Qur'anic exegesis and psychology of power, offering a normative framework for ethical, humanistic, and value-based leadership.

Kata kunci:

Pharaoh, power, arrogance, psychology of power, Qur'anic leadership.

Pendahuluan

Kekuasaan dalam pandangan Islam merupakan amanah yang sangat besar dan sekaligus ujian berat bagi manusia. Al-Qur'an berulang kali mengingatkan bahwa kekuasaan adalah titipan Allah yang akan simintai pertanggungjawaban. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30, Allah menyebutkan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi, yakni makhluk yang diberi wewenang untuk mengatur, memimpin, dan menegakkan keadilan di tengah kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukan sekedar hak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan nilai-nilai moral dan spiritual.

Namun, dalam realitas sejarah, kekuasaan sering kali melahirkan paradoks. Di satu sisi, ia menjadi sarana efektif untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Tetapi di sisi lain, kekuasaan yang tidak disertai kesadaran moral dapat berubah menjadi alat penindasan. Sejarah manusia sarat dengan kisah para penguasa yang awalnya berjuang untuk rakyatnya, namun kemudian tertangkap dalam pesona kekuasaan yang menyesatkan. Fenomena ini menguatkan pandangan klasik bahwa kekuasaan memiliki potensi besar untuk merusak integritas moral manusia ketika tidak diimbangi oleh kesadaran akan tanggung jawab ilahiah.

Dalam konteks Al-Qur'an, salah satu tokoh yang paling mencolok dalam menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan adalah Fir'aun, raja Mesir kuno yang menolak keras dakwah Nabi Musa a.s. Fir'aun digambarkan bukan hanya sebagai penguasa yang zalim, tetapi juga simbol ekstrem dari kesombongan manusia yang menuhankan dirinya sendiri. Al-Qur'an menegaskan kesombongannya dalam firman Allah QS. An-Nazi'at [79]: 24, Ia bahkan mengklaim dirinya sebagai penguasa tertinggi dan menolak keberadaan otoritas yang lebih tinggi dari dirinya. Perilaku tersebut mencerminkan bentuk paling ekstrem dari arogansi kekuasaan, yakni ketika seseorang kehilangan kesadaran spiritual dan moral karena terpicu oleh kekuasaan yang absolut.

Arogansi Fir'aun bukan hanya persoalan teologis, melainkan juga fenomena psikologis yang kompleks. Ia menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat mengubah struktur kepribadian seseorang, menjadikannya haus kendali, takut kehilangan posisi, dan menganggap dirinya sebagai pusat kebenaran. Ia menggunakan kekuasaannya untuk membelah masyarakat, menanamkan ketakutan, dan menciptakan sistem sosial yang tunduk sepenuhnya pada kehendaknya. Dalam perspektif psikologi sosial, perilaku semacam ini sejalan dengan konsep *authoritarian personality*, yakni kepribadian yang menggunakan kekuasaan, menolak perbedaan, dan cenderung menindas pihak yang dianggap lemah.

Jika ditarik ke konteks kekinian, kisah Fir'aun memiliki relevansi yang kuat dengan fenomena kepemimpinan modern. Meskipun zaman telah berubah, pola arogansi kekuasaan yang serupa masih sering muncul dalam bentuk yang lebih halus. Banyak pemimpin di berbagai negara menampilkan ciri-ciri identik: narsisme politik, kecanduan popularitas, ketakutan kehilangan legitimasi, serta hilangnya empati terhadap rakyat. Kekuasaan yang seharusnya menjadi instrument pelayanan publik justru berubah menjadi alat mempertahankan citra diri dan kepentingan kelompok.

Dalam konteks globalisasi dan politik populis dewasa ini, kecenderungan tersebut semakin jelas terlihat. Pemimpin sering kali lebih menonjolkan pencitraan daripada substansi, dan mengutamakan kekuasaan daripada tanggung jawab moral. Mereka menggunakan kekuasaan untuk membangun loyalitas semu dan menekan pihak-pihak yang dianggap mengancam stabilitas posisinya. Pola seperti ini sejatinya merefleksikan "mentalitas Fir'aun modern", di mana kekuasaan dijalankan bukan sebagai amanah, tetapi sebagai bentuk penguasaan atas manusia lain.

Kisah Fir'aun dalam Qashashul Qur'an dengan demikian bukan sekedar narasi historis, melainkan cermin moral dan psikologis bagi seluruh pemegang kekuasaan. Ia menggambarkan perjalanan batin seorang pemimpin yang gagal mengenali batas dirinya di hadapan Tuhan dan rakyatnya. Kisah ini juga memberikan gambaran yang sangat manusiawi tentang bagaimana kekuasaan yang tidak dibingkai oleh nilai spiritual dapat

menimbulkan dehumanisasi dan keruntuhan etika, sebagaimana di sebutkan dalam Firman Allah QS. Al-Qashash [28]: 4.

Dalam kerangka penelitian ini, analisis terhadap kisah Fir'aun tidak hanya bertujuan memahami sisi teologis, tetapi juga berusaha menyingkap mekanisme psikologis yang melatarbelakangi arogansi kekuasaan. Dengan memadukan pendekatan tafsir tematik dan teori psikologi kekuasaan, penelitian ini berupaya menemukan relevansi antara kisah klasik dalam Al-Qur'an dengan realitas kepemimpinan masa kini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan pokok:

1. Bagaimana Al-Qur'an menggambarkan aspek psikologis dari arogansi kekuasaan Fir'aun?
2. Apa saja nilai-nilai ibrah yang dapat dipetik dari kisah Fir'aun sebagai pelajaran bagi kepemimpinan modern?

Melalui dua pertanyaan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian interdisipliner antara studi Al-Qur'an dan ilmu psikologi, serta menawarkan refleksi normatif untuk membangun model kepemimpinan yang beretika, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan desain studi kepustakaan untuk menganalisis konstruksi psikologis arogansi kekuasaan Fir'aun sebagaimana direkam dalam Qashashul Qur'an serta menggali nilai-nilai ibrah yang relevan bagi kepemimpinan modern. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan tafsir *maudhū'i* (tematik), yaitu menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang memuat kisah Fir'aun kemudian mengkajinya berdasarkan tema kekuasaan, kesombongan, otoritarianisme, dan dinamika psikologis tirani. Sumber primer penelitian mencakup ayat-ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang Fir'aun terutama dalam surah Al-Qashash, Al-A'raf, Yunus, Asy-Syu'ara', Ghafir, dan An-Nazi'at, serta kitab-kitab tafsir klasik seperti *Jāmi' al-Bayān* karya al-Tabari, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurthubi, *Tafsir Ibn Kathir*, dan *Mafāth al-Ghaib* karya al-Razi. Sementara itu, sumber sekundernya terdiri dari literatur etika kepemimpinan Islam seperti *Ihya' 'Ulum al-Din* karya al-Ghazali, *Adab al-Dunya wa al-Din* karya al-Mawardi, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* karya Ibn Taimiyyah, serta berbagai jurnal akademik modern mengenai psikologi kekuasaan, otoritarianisme, dan studi tafsir tematik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap teks ayat, tafsir, dan literatur klasik, yang kemudian dikategorikan melalui teknik koding tematik untuk mengidentifikasi pola-pola seperti kesombongan, manipulasi sosial, penyalahgunaan otoritas, dehumanisasi, dan keruntuhan moral akibat kekuasaan absolut. Analisis data ditempuh melalui tiga langkah: analisis tematik Qur'ani untuk menelusuri pola perilaku Fir'aun dalam berbagai surah; analisis psikologi kepemimpinan yang menghubungkan narasi Qur'ani dengan teori-teori seperti *authoritarian personality*, narsisme politik, dan delusi kekuasaan; serta analisis komparatif-kontekstual guna mengaitkan temuan Qur'ani dengan fenomena kepemimpinan kontemporer, termasuk politik populis dan otoritarianisme modern. Untuk menjaga validitas data, penelitian melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai tafsir klasik, analisis lintas ayat untuk memastikan konsistensi

tematik, dan kritik isi untuk menilai keutuhan argumentasi berdasarkan konteks bahasa, teologi, dan metodologi tafsir klasik.

Hasil dan Pembahasan

I. Landasan Teoritis dan Konseptual

A. Kekuasaan dalam Perspektif Islam: Amanah dan Khalifah

Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukan sekadar hak politik, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Konsep ini bersumber dari pandangan Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan sebagai *khalifah fi al-ardh*, yakni wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan, dan mewujudkan kemaslahatan. Mandat kekhalifahan tersebut menuntut integritas spiritual, moral, dan rasional agar kekuasaan tidak berubah menjadi alat kesewenang-wenangan.

Al-Mawardi dalam *Adab al-Dunya wa al-Din* menegaskan bahwa kekuasaan memiliki dua sisi: sebagai sarana untuk menegakkan kebenaran, dan sebagai potensi ujian yang dapat menjerumuskan manusia pada kesombongan. Karena itu, seorang pemimpin sejati harus memandang jabatannya bukan sebagai kehormatan duniawi, tetapi sebagai beban moral dan tanggung jawab spiritual.

Konsep kekhalifahan dalam Al-Qur'an mengandung makna pengawasan ganda: di satu sisi manusia diberi kebebasan untuk mengelola bumi, namun di sisi lain tetap terikat oleh hukum moral Ilahi. Ibn Taimiyyah dalam *Al-Siyasah al-Syar'iyah* menegaskan bahwa kekuasaan tidak akan tegak kecuali dengan keadilan, karena keadilan merupakan ruh dari pemerintahan Islam. Lebih lanjut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kekuasaan dalam Islam memiliki sifat fungsional, bukan absolut. Pemimpin hanyalah pengelola amanah Allah, bukan pemilik mutlak atas rakyat dan sumber daya. Dengan demikian, penyalahgunaan kekuasaan berarti bentuk pengkhianatan terhadap amanah Ilahi.

Potensi kekuasaan untuk merusak moral manusia telah diingatkan pula dalam berbagai tafsir klasik. Al-Qurthubi menafsirkan bahwa manusia seringkali tergoda oleh *thaghut*, yaitu kekuatan yang melampaui batas ketundukan kepada Allah SWT, sehingga kekuasaan yang seharusnya menjadi sarana keadilan justru berubah menjadi alat penindasan. Karena itu, kesadaran akan batas moral dan spiritual menjadi fondasi utama agar kekuasaan tidak menjelma menjadi kezaliman.

B. Kerangka Psikologis Arogansi Kekuasaan

1. Defenisi dan Hakikat Arogansi Kekuasaan

Arogansi kekuasaan dalam Al-Qur'an sering digambarkan melalui istilah *istikbar*, yaitu sikap menolak kebenaran dan merendahkan orang lain karena merasa lebih tinggi. Ibn Katsir menjelaskan bahwa *istikbar* adalah sumber utama kehancuran spiritual para penguasa zalim, termasuk Fir'aun, Qarun, dan Haman. Sikap ini menumbuhkan keyakinan palsu bahwa kekuasaan berasal dari kemampuan diri, bukan dari Allah.

Menurut Sayyid Qutb, *istikbar* merupakan bentuk penyakit hati yang mengaburkan realitas. Penguasa yang terjangkit penyakit ini kehilangan kemampuan untuk mendengar kebenaran, karena egonya telah menjadi penghalang antara dirinya dan petunjuk Ilahi. Dalam konteks sosial-politik, *istikbar* melahirkan struktur kekuasaan yang otoriter dan represif, sebagaimana digambarkan dalam kisah Fir'aun. Quraish Shihab menyebut

fenomena ini sebagai “degradasi spiritual penguasa”, di mana kekuasaan yang semula berniat untuk kemaslahatan berubah menjadi alat mempertahankan kehormatan diri. Arogansi muncul ketika seorang pemimpin merasa dirinya menjadi pusat kebenaran dan tidak lagi membutuhkan nasihat atau koreksi.

2. Kepribadian Otoriter dalam Konteks Keislaman

Dalam psikologi Islam klasik, ulama seperti al-Ghazali menjelaskan bahwa kesombongan (*kibr*) dan kebanggaan diri (*ujub*) merupakan penyakit hati yang dapat menimbulkan perilaku zalim. Seorang penguasa yang hatinya dipenuhi *ujub* akan memandang rakyat sebagai alat, bukan amanah.

Al-Ghazali membedakan antara dua jenis takabbur: yang lahir dari kebodohan spiritual dan yang muncul dari kekuasaan. Jenis kedua lebih berbahaya karena melibatkan struktur sosial yang menormalisasi kezaliman. Dalam konteks ini, kepribadian otoriter bukan hanya masalah psikis, tetapi juga masalah moral dan epistemologis, yaitu penolakan terhadap kebenaran yang datang dari luar dirinya. Pandangan ini selaras dengan tafsir Fakhr al-Razi yang menyebut bahwa Fir'aun tidak menolak risalah Musa karena tidak paham, tetapi karena takut kehilangan kekuasaan dan status sosial. Artinya, arogansi kekuasaan bersumber dari rasa takut (*khauf al-fa'q*), takut kehilangan kendali dan legitimasi.

Secara konseptual, arogansi kekuasaan dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan psikologis yang dipicu oleh hilangnya kesadaran spiritual (*dzikrullah*). Ketika dzikir melemah, ego manusia membesar dan mulai menuhankan kekuasaan. Inilah yang menyebabkan seorang pemimpin mengalami “delusi ketuhanan” sebagaimana terjadi pada Fir'aun.

C. Relevansi Konseptual bagi Analisis Qashashul Qur'an

Kerangka teoretis di atas menunjukkan bahwa arogansi kekuasaan merupakan kombinasi antara penyimpangan spiritual (*istikbar*) dan gangguan moral (*zulm*). Dalam Qashashul Qur'an, Fir'aun dijadikan prototipe untuk memahami bahaya kekuasaan absolut tanpa nilai ketuhanan. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), kisah Fir'aun dapat dipahami bukan sekadar sebagai peristiwa sejarah, tetapi sebagai model psikologis yang menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat menjerumuskan manusia pada kehancuran moral.

Melalui perspektif ini, penelitian tentang arogansi Fir'aun akan memadukan dua ranah keilmuan:

- 1) Teologi kekuasaan dalam Al-Qur'an,
- 2) Psikologi moral dalam kerangka keislaman.

Kombinasi keduanya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika batin pemimpin yang menyalahgunakan amanah, serta relevansinya bagi fenomena kepemimpinan modern.

II. Analisis Psikologis Arogansi Kekuasaan Fir'aun dalam Qashashul Qur'an

A. Fir'aun sebagai Simbol Penyalahgunaan Kekuasaan

Al-Qur'an menggambarkan Fir'aun sebagai penguasa yang zalim dan sombong, menolak risalah Nabi Musa a.s., serta menuhankan dirinya sendiri. Dalam makna ayat,

Fir'aun berkata kepada rakyatnya bahwa dialah tuhan tertinggi dan pemilik kekuasaan mutlak atas Mesir. Tafsir al-Qurthubi menjelaskan bahwa pernyataan ini lahir dari kesombongan luar biasa yang menjadikan Fir'aun buta terhadap hakikat dirinya sebagai makhluk. Quraish Shihab menafsirkan perilaku Fir'aun sebagai simbol dari kekuasaan yang kehilangan orientasi spiritual. Ia menganggap kekuasaan sebagai hak absolut, bukan amanah dari Allah. Dengan demikian, akar arogansi Fir'aun bukan sekadar politis, melainkan teologis, yakni penolakan terhadap kedaulatan Allah dan pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan.

Dalam kerangka psikologis Islam, sikap seperti ini disebut *istikbar* (kesombongan yang menolak kebenaran). Ibn Katsir menjelaskan bahwa *istikbar* Fir'aun membuat hatinya tertutup dari petunjuk, karena ia meyakini dirinya lebih tinggi dari seluruh manusia.

B. Mekanisme Psikologis Arogansi Fir'aun

1. Ilusi Ketuhanan dan Kerusakan Hati

Dalam makna ayat, Fir'aun mengklaim tidak ada tuhan lain bagi rakyat Mesir selain dirinya. Al-Maraghi menafsirkan bahwa klaim ini adalah bentuk *ghurur* (tertipu oleh diri sendiri), di mana kekuasaan membuatnya merasa memiliki kemampuan ilahiah. Para ulama tasawuf seperti al-Ghazali menjelaskan bahwa akar penyakit ini adalah *ujub* dan *takabbur*, yaitu rasa bangga terhadap diri yang berlebihan hingga menolak kebenaran. Dalam konteks kekuasaan, *ujub* menyebabkan pemimpin merasa segala keberhasilan bersumber dari dirinya sendiri, bukan dari pertolongan Allah.

Tindakan Fir'aun yang menolak ajakan Musa juga menunjukkan fenomena *ta'ammud al-juhud* (penolakan sadar terhadap kebenaran), sebagaimana dijelaskan oleh Fakhr al-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib*. Menurutnya, Fir'aun mengetahui kebenaran dakwah Musa secara rasional, tetapi menolaknya demi mempertahankan wibawa politik.

2. Strategi Kekuasaan: Menebar Ketakutan dan Membelah Masyarakat

Dalam makna ayat surah Al-Qashash [28]: 4 disebutkan bahwa Fir'aun berlaku sombong di muka bumi dan menjadikan penduduk Mesir berkelompok-kelompok, menindas satu golongan dan memuliakan yang lain. Tafsir Ibn Katsir menegaskan bahwa ini adalah strategi politik untuk mengokohkan kekuasaan melalui perpecahan dan ketakutan. Sayyid Qutb dalam *Fi Zhilal al-Qur'an* menafsirkan bahwa sistem pemerintahan Fir'aun dibangun di atas rasa takut: rakyat dipaksa tunduk, sementara lawan politik dihancurkan. Secara psikologis, pola ini menumbuhkan *hubb al-mulk* (cinta kekuasaan) yang berlebihan, hingga menjadikan kekuasaan sebagai tujuan hidup, bukan amanah.

Dalam perspektif Islam, sikap ini merupakan bentuk *zulm*, yaitu penindasan terhadap hak-hak manusia dan pelanggaran terhadap batas yang telah ditetapkan Allah. Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa kezaliman penguasa adalah sebab utama kehancuran sebuah negeri, sebagaimana yang terjadi pada kerajaan Fir'aun.

3. Penolakan terhadap Kebenaran dan Rasionalisasi Kezaliman

Ketika Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya, Fir'aun menuduh Musa sebagai tukang sihir. Tafsir al-Razi menjelaskan bahwa tuduhan ini merupakan bentuk *tahrif ma'nawi*, yaitu upaya mengalihkan makna kebenaran agar tampak salah di mata masyarakat. Ia tidak menolak karena ketidaktahuan, tetapi karena kesombongan dan ketakutan

kehilangan legitimasi. Quraish Shihab menilai bahwa sikap Fir'aun ini menunjukkan adanya mekanisme rasionalisasi moral, di mana seseorang mencari pembenaran bagi kejahatan yang dilakukan. Inilah yang membuat kezaliman menjadi sistemik, karena masyarakat diajak untuk menganggap kejahatan sebagai bentuk “kebaikan demi stabilitas”.

Dalam makna ayat, ketika Fir'aun ditenggelamkan, barulah ia mengakui keesaan Allah. Namun Allah menolak pengakuan itu karena datang setelah tanda-tanda kebinasaan tampak. Ini menggambarkan kehancuran spiritual yang disebut oleh al-Ghazali sebagai *ghaflah mutlaqah*, yaitu kelalaian total akibat hati yang tertutup oleh kesombongan.

C. Refleksi Moral dan Pelajaran Psikologis

Kisah Fir'aun mengandung pelajaran mendalam bagi setiap pemegang kekuasaan. Kekuasaan tanpa kendali spiritual akan melahirkan kesombongan, kezaliman, dan kehancuran moral. Para mufasir menegaskan bahwa kisah ini tidak hanya ditujukan kepada penguasa masa lalu, tetapi sebagai peringatan bagi setiap manusia yang berpotensi terjerumus dalam kesombongan ketika memiliki otoritas.

Dalam konteks modern, pola “Fir'aunisme” dapat muncul pada pemimpin, pejabat, bahkan individu yang menolak kebenaran karena rasa superioritas. Maka, sebagaimana diingatkan dalam QS. Al-Qashash [28]: 83, kejayaan sejati hanyalah bagi orang-orang yang tidak mencari keangkuhan di bumi dan tidak berbuat kerusakan.

III. Ibrah Kisah Fir'aun bagi Kepemimpinan Modern

A. Fir'aun sebagai Cermin Degradasi Moral Kekuasaan

Kisah Fir'aun dalam Al-Qur'an merupakan gambaran paling komprehensif tentang kehancuran moral akibat penyalahgunaan kekuasaan. Fir'aun tidak hanya menolak kebenaran yang dibawa Nabi Musa, tetapi juga menampilkan bentuk ekstrem dari *istikbar* (kesombongan struktural) dan *zulm* (kezaliman sistemik).

Menurut al-Qurthubi, kezaliman Fir'aun tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi kekuasaan tanpa kontrol moral dan spiritual. Ia memerintah dengan mengandalkan rasa takut (*khauf*) di masyarakat, sehingga ketaatan rakyat bukan karena cinta, melainkan karena teror. Siklus ini menandai apa yang oleh para ulama disebut *thaghutiyyah*, yaitu sistem kekuasaan yang mengangkat manusia ke posisi “tuhan” terhadap sesamanya. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa Fir'aun menjadi simbol setiap rezim yang menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mengendalikan nurani rakyat. Arogansi Fir'aun bukan semata karena ambisi politik, tetapi karena kehilangan kesadaran tauhid. Ia memandang dirinya sebagai sumber hukum dan kebenaran suatu bentuk “pengkudusan diri” yang menandai kehancuran spiritual seorang pemimpin.

Dalam konteks psikologi kekuasaan, sikap Fir'aun menunjukkan gejala yang oleh al-Ghazali disebut sebagai *ujub al-qudrah* (kesombongan karena merasa mampu). Ia terperangkap dalam ilusi bahwa keberhasilannya adalah hasil kekuatan pribadi, bukan karunia Ilahi. Padahal, dalam pandangan Islam, keberhasilan seorang pemimpin merupakan hasil kolaborasi antara usaha manusia dan kehendak Tuhan.

Dengan demikian, kisah Fir'aun mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak disertai kesadaran spiritual akan melahirkan delusi ketuhanan dan kezaliman sosial. Pemimpin modern yang mengabaikan nilai etis dan tauhid berisiko jatuh pada pola yang sama:

memusatkan kekuasaan, menyingkirkan kritik, dan memanipulasi hukum untuk kepentingan diri sendiri.

B. Prinsip Keadilan sebagai Antitesis Fir'aunisme

Islam menempatkan keadilan sebagai pilar utama dalam tata kelola kekuasaan. Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa keberlangsungan pemerintahan bergantung pada tegaknya keadilan, bukan pada identitas atau kekuatan politik. Ia menulis bahwa “pemerintahan yang adil akan berdiri, meskipun dipimpin oleh orang kafir; sedangkan pemerintahan zalim akan runtuh, meskipun dipimpin oleh seorang muslim.” Konsep ini menolak model kekuasaan tiranik seperti Fir'aun, yang menegakkan legitimasi melalui penaklukan dan ketakutan. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa pemimpin sejati adalah yang menegakkan keadilan, memelihara hak rakyat, dan menolak segala bentuk penindasan. Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib bersikap rendah hati karena kekuasaan hanyalah sarana untuk menegakkan agama dan kemaslahatan umum.

Quraish Shihab menambahkan bahwa adil dalam konteks kekuasaan berarti menempatkan setiap pihak pada posisi yang semestinya, tidak melampaui batas dan tidak pula menyepelekan tanggung jawab. Keadilan bukan hanya soal hukum, tetapi juga cara pandang moral terhadap manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah. Dengan demikian, prinsip keadilan berfungsi sebagai “penangkal spiritual” terhadap kecenderungan *istikbar*. Seorang pemimpin yang menegakkan keadilan akan selalu mengingat bahwa kekuasaan hanyalah amanah sementara, sedangkan kezaliman akan menjadi sebab kehancuran pribadi dan sosial.

C. Etika Kepemimpinan Qur'ani: Antitesis Psikologis terhadap Arogansi

Dalam tradisi Islam, pemimpin ideal digambarkan sebagai amir yang menggabungkan tiga dimensi: amanah, ilmu, dan kasih sayang. Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menekankan bahwa inti kepemimpinan bukanlah dominasi, melainkan pelayanan (*khidmah*). Pemimpin yang benar memahami bahwa kekuasaan adalah ujian. Ia harus menundukkan hawa nafsu, mengendalikan ego, dan mendahulukan maslahat publik di atas kepentingan pribadi. Dalam hal ini, kesadaran *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa) menjadi fondasi psikologis kepemimpinan Qur'ani.

Ibn Khaldun menambahkan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik, tetapi oleh kemampuan pemimpinnya menjaga solidaritas sosial (*'ashabiyyah*) melalui keadilan dan moralitas. Ketika pemimpin kehilangan integritas moral, masyarakat pun akan kehilangan kepercayaan, dan kekuasaan menjadi rapuh.

Dalam konteks modern, etika kepemimpinan Qur'ani menuntut keseimbangan antara profesionalisme dan spiritualitas. Pemimpin yang berorientasi pada nilai Ilahi akan mampu menghadirkan sistem yang manusiawi, terbuka terhadap kritik, dan bebas dari sikap otoriter.

D. Relevansi untuk Kepemimpinan Kontemporer

Pelajaran dari kisah Fir'aun sangat relevan bagi fenomena kepemimpinan masa kini. Di era modern, bentuk *fir'aunisme* tidak selalu berupa klaim ketuhanan literal, tetapi bisa muncul dalam wujud penyalahgunaan kekuasaan, korupsi moral, kultus individu, dan pemusatan wewenang. Pemimpin modern dapat mengambil tiga ibrah utama dari kisah ini:

- 1) Kekuasaan tanpa nilai akan berujung pada kehancuran. Seperti Fir'aun, pemimpin yang menuhankan kekuasaan akan kehilangan orientasi moral.
- 2) Keadilan dan kerendahan hati adalah benteng kekuasaan. Pemimpin yang rendah hati dan adil akan lebih mampu mempertahankan kepercayaan rakyat.
- 3) Kekuasaan sejati adalah kemampuan melayani. Islam menilai keberhasilan pemimpin bukan dari lamanya berkuasa, tetapi dari sejauh mana ia menghadirkan kemaslahatan bagi umat.

Sebagaimana ditegaskan oleh M. Natsir, pemimpin dalam Islam tidak sekadar mengatur, tetapi membimbing umat menuju ridha Allah. Maka, kepemimpinan Qur'ani adalah perpaduan antara *moralitas profetik* dan *manajemen kemaslahatan*.

Kesimpulan

Kisah Fir'aun dalam Qashashul Qur'an tidak sekadar menyajikan tragedi sejarah kekuasaan absolut, tetapi merupakan cermin psikologis dan moral bagi setiap bentuk kepemimpinan. Melalui analisis psikologis terhadap karakter Fir'aun, tampak bahwa akar dari arogansi kekuasaan berawal dari hilangnya kesadaran spiritual dan keterikatan diri pada nilai-nilai ilahiah. Kekuasaan yang seharusnya menjadi sarana pelayanan dan keadilan berubah menjadi alat penindasan dan pembenaran diri. Dari sisi psikologis, arogansi Fir'aun memperlihatkan gejala *ujub*, *takabbur*, dan ketergantungan patologis terhadap kekuasaan. Struktur kepribadiannya menunjukkan kehilangan kendali moral, sebagaimana tergambarkan dalam konsep *authoritarian personality* yang selaras dengan analisis para ulama klasik tentang *istikbar* dan *zulm*. Al-Qur'an menggambarkan bahwa bentuk kekuasaan semacam ini selalu membawa pada dehumanisasi dan keruntuhan moral, karena mengingkari hakikat manusia sebagai makhluk yang lemah di hadapan Tuhan.

Dalam konteks modern, kisah Fir'aun menemukan relevansi yang kuat. Pemimpin masa kini, baik dalam ranah politik, ekonomi, maupun sosial, sering kali terjebak dalam pola "Fir'aunisme halus": kultus individu, manipulasi publik, serta kecanduan pada popularitas dan legitimasi palsu. Fenomena ini menunjukkan bahwa pola psikologis yang sama tetap hidup dalam struktur kekuasaan manusia lintas zaman. Sebaliknya, kepemimpinan Qur'ani menekankan keseimbangan antara tanggung jawab spiritual dan sosial. Kekuasaan yang dibingkai oleh nilai tauhid, keadilan, dan amanah akan melahirkan kepemimpinan yang beretika, rendah hati, serta berpihak pada kemaslahatan publik. Seperti diingatkan oleh Ibn Taimiyyah, pemerintahan yang adil akan bertahan meski tanpa simbol religius, sementara pemerintahan zalim akan hancur meski mengatasnamakan agama. Prinsip ini menunjukkan bahwa moralitas dan keadilan adalah fondasi utama dalam sistem kekuasaan Islami.

Dengan demikian, *Qashash Fir'aun* tidak hanya mengajarkan tentang kehancuran seorang tiran, tetapi juga menawarkan paradigma moral tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan, bukan untuk menundukkan manusia, melainkan untuk menegakkan martabatnya.

Saran dan Implikasi Penelitian

1. Bagi Studi Keislaman

Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam studi tafsir, khususnya integrasi antara tafsir tematik dan psikologi sosial. Kajian terhadap tokoh Fir'aun dapat menjadi model untuk memahami dinamika kejiwaan kekuasaan dalam teks-teks Al-Qur'an lainnya. Disarankan agar penelitian lanjutan memperluas objek kajian pada figur-

figur lain seperti Namrudz atau Qarun untuk memperkaya analisis tentang patologi kekuasaan. Bagi Etika Kepemimpinan Modern

2. Bagi Etika Kepemimpinan Modern

Pemimpin Muslim perlu menjadikan kisah Fir'aun sebagai cermin spiritual agar terhindar dari sikap istikbar dalam bentuk modern seperti penyalahgunaan jabatan, pengabaian kritik, dan penindasan simbolik. Nilai-nilai seperti *amanah*, *'adl*, dan *tazkiyah al-nafs* harus dijadikan pilar dalam setiap keputusan strategis pemerintahan maupun organisasi.

3. Bagi Pendidikan dan Pembinaan Karakter

Lembaga pendidikan Islam diharapkan mengembangkan kurikulum kepemimpinan berbasis nilai Qur'ani yang menekankan dimensi moral dan psikologis kekuasaan. Materi seperti kisah Fir'aun dapat digunakan sebagai studi kasus reflektif dalam pelatihan kepemimpinan dan etika publik.

Referensi

Al-Qur'an Al-Karim

Abu Hamid al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946.

Al-Alusi. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

al-Baghawi. *Ma'alim al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Al-Mawardi. *Adab al-Dunya wa al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

———. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1967.

Al-Raghib al-Ashfahani. *Al-Dhari'ah ila Makarim al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992.

———. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

al-Tabari. *Jami' al-Bayan*. Kairo: Dar Hijr, 2001.

Fakhruddin al-Razi. *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats, 1999.

Harun Nasution. *Islam Rasional*. Jakarta: Mizan, 1995.

Ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Kairo: Dar al-Fikr, 2004.

Ibn Taimiyyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Kairo: Dār al-Hadīth, 1992.

Karen Stenner. *The Authoritarian Dynamic*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

M. Amin Abdullah. "Pendekatan Interdisipliner dalam Kajian al-Qur'an." *Jurnal Studi Islamika* 9 (2002): 167.

M. Natsir. *Capita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

———. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.

———. Wawasan al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 1999.

Nur Kholis Setiawan. "Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Al-Qur'an." *Jurnal Ushuluddin* 27 (2019): 14–15.

Robert Greene. *The 48 Laws of Power*. New York: Penguin, 2000.

Sayyid Qutb. *Fi Zhilal al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.

Theodor W. Adorno et al. *The Authoritarian Personality*. New York: Harper & Brothers, 1950.

Yasir Sulaiman. "Politik Citra dalam Kepemimpinan Modern." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 8 (2019): 203.